



RENCANA KERJA

**RENJA
2021**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga periode RenstraTahun 2017-2022 yang bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja Tahun 2021 terdiri dari pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu, tujuan, sasaran, indikator kinerja yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, program/kegiatan, dana indikatif beserta sumbernyadi 2021 dan prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif di tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2021.

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2021 terkait dengan substansi perubahan di bidang tata kelola pemerintahan yang meliputi bidang kelembagaan, analisa jabatan dan ketatalaksanaan serta sejalan dengan tema pembangunan DIY Tahun 2021. Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mendukung tercapainya misi kedua dari RPJMD DIY 2018-2022 yaitu; ***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis***; dimanarumusan misi ini meringkas Panca Mulia 4, dan 5. Dari Misi tersebut, ditetapkanlah tujuan Biro Tata Pemerintahan, yang diharapkan akan tercapai di 2022 nanti yaitu;Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Demikian Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2021 kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua pihak, khususnya untuk pelaksanaan program kegiatan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2021 nanti. Biro Tata Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerjasama sinergisdari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di DIY

Yogyakarta, Agustus 2020

Kepala Biro Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah DIY,



Ir. SUGENG PURWANTO, M. M. A
NIP.196505251991031017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-5
1.4 Sistematika Penulisan	1-5
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2019	2-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2019....	2-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-32
2.2.1 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-32
2.2.2 Urusan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum	2-35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	2-39
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	2-45
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	3-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	3-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	3-3
3.3 Program dan Kegiatan	3-5
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	4-1
BAB 5 PENUTUP	5-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-2
Tabel 2. 2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran	2-24
Tabel 2. 3 Capaian Target Kinerja Renstra Biro Tata Pemerintahan	2-25
Tabel 2. 4 Dinamika Perencanaan pada Indikator Kinerja.....	2-27
Tabel 2. 5 Dinamika Perencanaan Program/Kegiatan Pada Indikator Kinerja	2-29
Tabel 2. 6 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019	2-33
Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2019 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-35
Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah Tahun 2019.....	2-38
Tabel 2. 9 Rencana Kinerja Tahun 2021	2-45
Tabel 2. 10 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	2-46
Tabel 2. 11 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	2-57
Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	3-4
Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.....	3-5
Tabel 4. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021.....	4-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	1-1
Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah	2-44

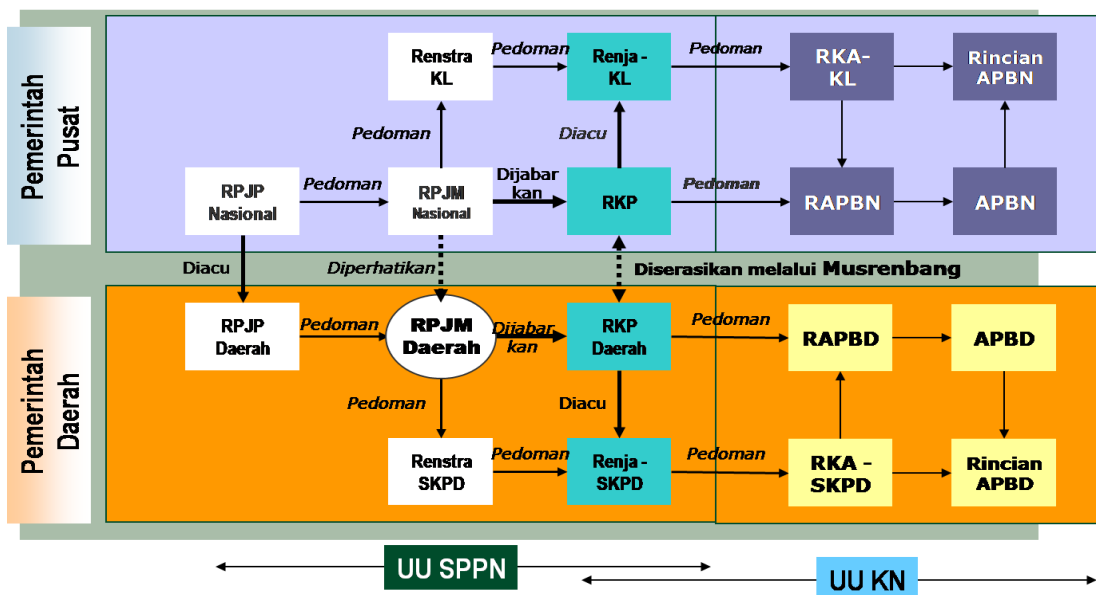
BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Kemudian Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mendefinisikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Alur perencanaan pembangunan kemudian berjalan sinergis dengan alur penganggaran, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Pada tingkat perencanaan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional diacu dalam penyusunan RPJP Daerah. RPJP Daerah selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Daerah. RPJM Daerah dan RKP Daerah tersebut kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD. Secara ringkas, alur perencanaan dan penganggaran dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Rancangan RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Penyusunan RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun ke-4 dari RPJMD DIY 2017 - 2022. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Rancangan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun Anggaran 2021 memiliki keterkaitan langsung dengan Rancangan RKPD DIY Tahun 2021. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rancangan Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2021, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY Tahun 2021. Selanjutnya Rancangan Renja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2021 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD DIY Tahun 2021 yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Terdapat lima regulasi pada level undang-undang yang mempengaruhi dan membawa konsekuensi untuk implementasi perencanaan dan penganggaran tahun 2021 pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY tahun 2021 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
2. Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
15. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Setra Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

- a. Memberikan arahan, acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan;
- b. Mengefektifkan dan mengarahkan proses pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

Tujuan :

Tersusunnya perencanaan daerah yang komprehensif, transparan, akuntabel, partisipatif serta selaras dengan visi misi Pemerintah Daerah DIY.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum serta sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2021.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (Tahun 2019)

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPDP, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan Renja, sasaran Renja dan uraian Program dan Kegiatan Renja.

BAB IV : Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

Bab ini berisi penutup dari uraian Bab-Bab sebelumnya.

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2019

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target program-kegiatan pada Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan realisasi pelaksanaan program-kegiatan pada tahun 2019, kemudian memperkirakan realisasi capaian target dalam Rencana Strategis (Renstra) pada tahun berjalan. Dengan demikian diperoleh informasi mengenai realisasi program kegiatan yang tidak mencapai target, kemudian program kegiatan yang mencapai target, serta program kegiatan yang melampaui target pada tahun 2019. Disamping itu, evaluasi juga dilakukan terhadap keadaan pegawai pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY beserta dengan analisis kebutuhan pegawai (data per tanggal 31 Desember tahun 2019), serta keadaan sarana dan prasarana pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun anggaran (TA) 2019.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2019

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY selanjutnya dipergunakan untuk menentukan program kegiatan yang tidak mencapai target, kemudian program kegiatan yang mencapai target, serta program kegiatan yang melampaui target pada tahun 2019, khususnya program/kegiatan hasil redesain SKPD tahun 2019. Penentuan didasarkan pada kolom 8 atau kolom prosentase Tingkat Realisasi (Realisasi Renja SKPD tahun 2019 dibagi dengan Target Renja SKPD tahun 2019). Berikut disampaikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 sampai dengan triwulan 2 Tahun 2020, Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Lembar : 1

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD		
							Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
4				Urusan Wajib									
4	01			Sekretariat Daerah									
02	01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
02	01	01	033	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	37 jenis	36 jenis	36 jenis	36 jenis	100%	37 jenis	30 jenis	81%
					Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	3 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	3 jenis	2 jenis	66,6%
					Barang Cetak	16 jenis	21 jenis	13 jenis	13 jenis	100%	16 jenis	10 jenis	62,5%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jasa surat menyurat (materai, perangko, paket pengiriman)	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	11 jenis	5 jenis	50%
		Penggandaan	80.000 lembar	58.344 lembar	65.094 lembar	65.094 lembar	100%	80.000 lembar	39.459 lembar	49,3%
		Pengisian tabung pemadam kebakaran	11 tabung	11 tabung	11 tabung	11 tabung	100%	11 tabung	-	-
		Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua	7 unit	8 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	-	-
		Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	-	--

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15 jenis	17 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	15 jenis	8 jenis	50%			
02	01	01	034	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Bukti pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola barang, dan pengelola kepegawaian	n/a	12 bulan	n/a	n/a	100%	12 bulan	6 bulan	50%
					Kinerja 1 Orang Caraka	12 bulan	n/a	n/a	n/a	100%	12 bulan	6 bulan	50%
					Kinerja 1 Orang Perencana Program	12 bulan	n/a	n/a	n/a	100%	12 bulan	6 bulan	50%
					Kinerja 2 Orang Pengemudi	12 bulan	n/a	n/a	n/a	100%	12 bulan	6 bulan	50%
					Kinerja 9 Orang Pengelola Keuangan	12 bulan	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
					Kinerja 1 Orang Fasilitasi Kepegawaian	12 bulan	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
					Kinerja 2 Orang Pengelola Barang	12 bulan	n/a	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
02	01	01	035	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	Makanan dan minuman rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
					Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
					Konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
02	01	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	01	02	107	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan operasional roda 4 (empat) sesuai RKBMD	1 unit	n/a	n/a	n/a	100%	1 unit	n/a	n/a
					Rehab ruangan untuk	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100%	1 paket	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		kelembagaan baru Biro Tata Pemerintahan											
02	01	02	02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	2 jenis	11 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
					Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	6 jenis	2 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
02	01	02	111	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Pemeliharaan peralatan/perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD	15 jenis	15 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	15 jenis	10 jenis	66,6%
02	01	02	112	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua	7 unit	8 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	4 unit	57,1%
					Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat	5 unit	5 unit	4 unit	4 unit	100%	5 unit	3 unit	60%
02	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD										
02	01	06	016	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan IKU)	Nilai 70	Nilai 81.21	Nilai 70	Nilai 86	122%	Nilai 70	Nilai 83,54	119,30%
02	01	06	017	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Tahunan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	-	-
					Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional	12 bulan	12 laporan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
					Laporan Realisasi Semesteran dan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Prognosis											
02	01	06	018	Penyusunan Rencana Progam Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Materi nformasi yang sesuai dengan: Data Profil Biro Tata Pemerintahan terkini, Data SIAK DIY, informasi SKPD Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang lengkap, akurat dan terkini	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	n/a	n/a
				Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
				Laporan Hasil Forum OPD untuk Musrenbang RKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
				Rencana Kerja (Renja)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
				Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
				Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
02	01	06	019	Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan sejumlah program dan kegiatan	95 %	95 %	95 %	95 %	100%	12 laporan	6 laporan	50%
				Kependudukan dan Catatan Sipil									
02	01	016		PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP-el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87.17	93.23%	82.67%	97,87%	118.38%	100%	100%	100%
01	12	16	011	Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil	Dukungan penerbitan dokumen aktakelahiran bagi penduduk miskin/marginal.	400 akta	500 akta kelahiran	500 akta kelahiran	500 akta kelahiran	100%	400 akta kelahiran	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Dukungan penerbitan dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/marginal.	n/a	210 akta perkawinan	100 akta	100 akta	100%	100 akta	n/a	n/a
		Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/marginal	200 akta	100 akta kematian	200 akta	200 akta	100%	n/a	n/a	n/a
		Dukungan penerbitan dokumen kependudukan untuk penduduk rentanadministrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat KeteranganOrang Terlantar), SKPLN (Surat	80 dokumen	80 dokumen	80 dokumen	80 dokumen	100%	80 dokumen	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Keterangan Pindah keLuar Negeri) bagi TKI								
		Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY	6 lembaga	n/a	3 lembaga	3 lembaga	100%	10 lembaga	n/a	n/a
		Pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lintas kab/kota se-DIY	5 kali	n/a	3 kali	3 kali	100%	5 kali	n/a	n/a
		Aparat kecamatan, desa, dan kabupaten yang paham atas Perda No.9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan	n/a	n/a	480 orang	480 orang	100%	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kartu Identitas Anak								
	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blangko KIA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	20.000 keping	20.000 keping	100%
		Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/marginal	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	400 akta	200 akta	50%
		Dokumen akta perkawinan bagi penduduk miskin/marginal	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	50 akta	-	-
		Dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	80 dokumen	-	-
		Kerjasama dengan lembaga penyedia jasa/layanan publik untuk pemberian insentif.						7 lembaga	-	-
		KTP-el dan KIA yang						100 KIA	100 KIA	100%

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		diterbitkan dalam pelayanan terpadu											
		KTP-el dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu						200 KTP-El	200 KTP-El	100%			
		Sosialisasi Perda No. 9 Tahun 2015						600 orang	600 orang	100%			
01	12	16	012	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	3 sistem	1 sistem	3 sistem	3 sistem	100%	1 sistem	-	-
					Profil perkembangan kependudukan di DIY	1 dokumen profil	1 dokumen profil	1 dokumen profil	1 dokumen profil	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
					Monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a	n/a	n/a
					Pemberian hak akses data kependudukan kepada instansi pengguna dalam	n/a	4 instansi	3 instansi	3 instansi	100%	2 instansi	-	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		rangka percepatan pelayanan publik											
02	01	016	007	Dukungan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	Buku laporan semester II tahun n-1 dan semester I tahun n	n/a	200 Buku	200 Buku	200 Buku	100%	n/a	n/a	n/a
					Tersebarluasnya kebijakan adminduk melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang	n/a	7 kali	7 kali.	7 kali	100%	1 kali	n/a	n/a
					Sosialisasi pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga	n/a	80 Instansi/ lembaga	50 Instansi/ lembaga	50 Instansi/ lembaga	100%	n/a	n/a	n/a
					Distribusi blangko KTP-el di kabupaten/kota se-DIY	n/a	201.500 Keping	120.000 Keping	150.000 Keping	100%	n/a	n/a	n/a
					Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan adminduk	n/a	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD		
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Rekomendasi kebijakan percepatan penerbitan akta kelahiran dan kematian	n/a	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	n/a	n/a	n/a	
		Penyebarluasan program pemanfaatan data kependudukan bagi instansi/lembaga penyedia layanan publik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30 lembaga	-	-	
		Peningkatan kapasitas Aparatur Adminduk di Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30 orang	-	-	
02	01	072	PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	100%
02	01	72	003	Pelaksanaan Rekomendasi	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	penerapan NSPK										
		LPPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%			
		Kajian kebijakan Otda	1kajian rekomendasi	1kajian rekomendasi	1kajian rekomendasi	1 kajian rekomendasi	100%	1kajian rekomendasi	n/a	n/a			
		Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi	-	-			
02	01	72	004	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri dan Aplikasi Naskah Perjanjian	5 naskah kerjasama	n/a	5 naskah kerjasama	5 naskah kerjasama	100%	5 naskah kerjasama	-	-
					Rekomendasi Hasil	5	n/a	0	5	100%	2 rekomendasi	-	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Monev Kerjasama Dalam Negeri	rekomendasi		rekomendasi	rekomendasi		dasi					
		Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 SKB : Program kegiatan kerjasama SKB	n/a	2 SKB : Program kegiatan kerjasama SKB	2 SKB : Program kegiatan kerjasama SKB	100%	2 SKB : Program kegiatan kerjasama SKB	-	-			
02	01	73	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	75.51%	n/a	26.53%	100%	376.93%	51.02	100	100	
02	01	73	001	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	Desa yang terdampangi dalam penyusunan dokumen APBDes Pro Poor	n/a	3 desa	5 desa	5 desa	100%	5 desa	5 desa	100%
				Desa dengan Perangkat BPD yang meningkat kapasitasnya dalam menyelenggarakan MUSDES	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 desa	5 desa	100%	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Desa dengan aparatur yang terbina dalam mengelola dokumen administrasi pemerintahan desa	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	5 desa	5 desa	100%
		Aparatur Kecamatan yang terbina sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	3 kecamatan	3 kecamatan	100%
02	01	73	002	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	Laporan Hasil Pemantauan kinerja kecamatan	1 Laporan	n/a	1 Laporan	1 Laporan	100%
					Laporan Hasil Pemantauan pengelolaan dana desa 5 desa tertinggal dan 387 desa di DIY	n/a	n/a	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%
02	01	74		PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan	100	100	100	100	100

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD				
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		penataan wilayah											
02	01	74	001	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan monitoring persiapan dan pelaksanaan Pemilu kepada Menteri Dalam Negeri	n/a	n/a	1 laporan	1 laporan	100%	n/a	n/a	n/a
					Draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan Dan	n/a	n/a	1 draft rapergub	1 draft rapergub	100%	n/a	n/a	n/a

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah								
		Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu	3 usulan/draf SK	3 usulan/draf SK	2 usulan/draf SK	3 usulan/draf SK	100%	2 usulan/draf SK	1 usulan/draf SK	50%
		Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum terkait Ketentraman Ketertiban Umum	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	150%	1 laporan	-	-
		Berkas pengesahan pengangkatan anggota DPRD	n/a	n/a	6 berkas	7 berkas	116%	n/a	n/a	n/a
		Rekomendasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 rekomendasi	-	-
		Laporan fasilitasi Penyelenggaraan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 laporan	-	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD			
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		Pilbup Bantul, Gunungkidul dan Sleman										
		Laporan Monitoring pelaksanaan Pilkada di 3 kabupaten	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1 laporan	-	-		
02	01	74	002	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/ kota di DIY	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen, 1 dokumen	100%
					Draft Rapergub Pengelolaan Wilayah Perbatasan	n/a	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	n/a	n/a
					Hasil pengukuran koordinat pilar batas wilayah DIY-Jateng secara geodetik	30 titik	20 titik	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-
					Kesepakatan bersama pemerintah Kab /	n/a	1 rekomendas	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen kesepakatan	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kota tentang penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan Kabupaten/ Kota dan atau antar Provinsi		i				n		
		Aparatur dan masyarakat yang paham tentang Pergub No. 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama RUPA BUMI Unsur Buatan	n/a	n/a	225 orang	225 orang	100%	n/a	n/a	n/a
		Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-
		Hasil Verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari	1 dokumen	n/a	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	-	-

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2018)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan terhadap RPJMD	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		kab/kota								

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi dari target tahun 2019 yang telah disusun seluruhnya memenuhi target dari yang telah ditetapkan. Dari sisi indikator output (keluaran) seluruhnya memenuhi target. Tetapi apabila di lihat dari indikator inputnya dari sisi realisasi anggarannya terdapat beberapa serapan yang tidak optimal yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang tidak mempengaruhi kualitas pencapaian target. Dari target anggaran sebesar Rp. 6.758.835.630 (100%), diperoleh angka realisasi sebesar Rp. 5.740.087.156 (84,92 %). Berikut disampaikan efisiensi anggaran per sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2019:

Tabel 2. 2 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	120,68	81,99	18,01
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	100	87,98	12,02

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2019

Berdasarkan tabel analisis efisiensi di atas dapat diketahui bahwa sasaran pertama dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan memiliki nilai efisiensi 18,01%. Efisiensi anggaran terjadi karena faktor eksternal di antaranya adalah kebijakan APBD untuk tidak membelanjakan rekening tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, efisiensi perjalanan dinas, dan sisa pengadaan barang dan jasa

Sedangkan indikator dari sasaran kedua dengan indikator Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK, memiliki nilai efisiensi 12,02%. Hal itu terjadi dikarenakan pada sasaran kedua juga mengalami efisiensi di beberapa rincian objek belanja. Beberapa efisiensi tersebut di atas, tidak mengganggu capaian indikator output kegiatan, sehingga capaian output tetap ≥100% dari target yang ditentukan.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur DIY dengan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sasaran strategis Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2019 adalah : 1) Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan

kerja sama; dan 2) Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan; dengan target Renstra dan realisasi capaian Renstra tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Capaian Target Kinerja Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2018-2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun 2019		Realisasi Capaian Renstra Tahun 2019		% Rasio Capaian Renstra Tahun 2019	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	
1	Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100	Rp. 2.240.820.000	120,68	Rp. 2.633.822.733	120,68	117.53
2	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	7	Rp. 626.790.000	100	Rp. 2.105.756.496	100	335.96
Rata-rata Capaian							120,68	226.75

Berdasarkan capaian target kinerja di atas, selanjutnya dilakukan analisis per sasaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada Renstra Tahun 2019. Secara umum capaian renstra tahun 2019 telah memenuhi target, bahkan pada indikator Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan melebihi target yaitu sebesar 120,68% dari target 100%. Berikut disampaikan evaluasi dan analisis Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2019 berdasarkan tabel di atas.

Pada sasaran kedua (Meningkatnya tertib administrasi kependudukan) mendapatkan dukungan tambahan dari Dana Alokasi Khusus sebesar anggaran Rp 1.227.772.000,00 untuk Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan sehingga total anggaran tahun 2019 (APBD+DAK) sejumlah Rp 2.393.369.680,00.

A. Sasaran Pertama : Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama

Sasaran pertama dalam Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2019 adalah Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama. Sasaran

ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan.

A.1. Indikator Kinerja : Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan

Indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan memiliki target kinerja dan anggaran pada Renstra tahun 2019 masing-masing sebesar 100% dan Rp2.240.820.000,00. Sedangkan realisasi capaian Renstra tahun 2019 untuk kinerja dan anggaran masing-masing mencapai 120,68% dan Rp. 2.633.822.733,00. Dengan demikian diperoleh rasio capaian Renstra tahun 2019 terhadap target dan realisasi sebesar 120,68% kinerja dan 117.53% anggaran (Tabel 2.1).

Secara makro, performa Biro Tata Pemerintahan Setda DIY untuk mencapai indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan (dengan target 100%) berjalan optimal. Sampai dengan akhir triwulan IV TA 2019, telah dihasilkan 35 dari total 29 rumusan bahan kebijakan dalam merespon dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, sehingga diperoleh capaian realisasi indikator sebesar 120,68%. Adapun rincian dari 12rumusan bahan kebijakan tersebut di antaranya ialah :

- a. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU;
- b. Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri
- c. Rekomendasi Tindak Lanjut Monev Kerjasama Dalam Negeri
- d. Draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, Persetujuan Pemanggilan untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- e. SK pemberhentian anggota DPRD dan peresmian pemberhentian antar waktu sebagai anggota DPRD
- f. Dear Rapergub Pengelolaan Wilayah Perbatasan
- g. Rekomendasi penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)
- h. Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

**Tabel 2. 4 Dinamika Perencanaan pada Indikator Kinerja
Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
yang direspon dengan kebijakan**

No.	Renstra Tahun 2019			RKA-P SKPD Tahun 2019		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran
1.	Program Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	100	927.480.000	Program Pengembangan Kerjasama dan Otonomi Daerah	100%	1.377.195.000
	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan		737.930.000	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan		848.334.000
	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri		553.610.000	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri		528.861.000
2.	Program Pembinaan Perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan	33,33%	693.840.000	Program Pembinaan Perangkat Kecamatan, Desa/Kelurahan	56,25%	941.200.000
	Pembinaan Aparatur Kecamatan, DIY Desa/Kelurahan		520.380.000	Pembinaan Aparatur Kecamatan, DIY Desa/Kelurahan		683.628.000
	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan		173.460.000	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan		257.572.000
3.	Program: Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	100%	619.500.000	Program Pemerintahan Umum Dan Pembinaan Wilayah	100%	893.655.000
	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi		470.350.000	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi		525.950.000
	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		149.150.000	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah		367.705.000
JUMLAH			2240.820.000	JUMLAH		3.212.050.000

Beberapa faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan pengalihan urusan kewenangan masih terdapat permasalahan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat terkait pengalihan aset Terminal A Kota Yogyakarta dan aset penyuluhan perikanan.
- 2) Adanya perangkat desa yang belum memahami tentang seluk-beluk pengelolaan keuangan desa;
- 3) Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang baru ditetapkan pada bulan April 2018 berdampak pada teknis kegiatan pendampingan APBDes Pro Poor, dari segi pedoman untuk melakukan entri pada program kegiatan berbasis pro kemiskinan (pro poor).

- 4) Terkait dengan segmen batas daerah antar kabupaten/kota lingkup DIY, untuk penggambaran peta batas daerah skala besar (1 : 5.000) saat ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena belum ada kesepakatan dengan wilayah yang berbatasan di Provinsi Jawa Tengah (desa dan kabupaten). Dengan demikian peta database tersebut (tahun 2014-2018) belum dapat digunakan untuk mendorong percepatan pelaksanaan KSP.
- 5) Kurangnya pemahaman pemerintah Kabupaten / Kota tentang Pergub Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pergantian Antar Waktu (PAW) Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD.
- 6) Belum adanya pedoman terkait pelaksanaan dan pelaporan evaluasi kinerja kecamatan, sehingga pemerintah kabupaten/kota belum menyampaikan laporan evaluasi kinerja kecamatan sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kemudian beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut.

- 1) Data inventarisasi pengalihan P3D telah siap.
- 2) Narasumber yang kompeten sesuai bidang yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yaitu DPPKA terkait pengelolaan keuangan desa, Biro Hukum pada teknik penyusunan produk hukum desa, Balai PMD terkait penguatan peran BPD dalam menginisiasi kebutuhan masyarakat desa melalui musyawarah desa dan Doktor dari UGM yang mengampu terkait penguatan kemitraan antara BPD dan Pemerintah Desa dalam sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta kesediaan Kepala Biro untuk memberikan pemahaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mendasarkan pada dua regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012.
- 3) Adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat baik Kemendagri maupun Kemendes tentang Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, regulasi Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

B. Sasaran Kedua : Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan

Sasaran kedua dalam Renstra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2019 adalah Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan. Sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK.

B.1. Indikator Kinerja :Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK

Indikator Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK memiliki target kinerja dan anggaran pada tahun 2019 masing-masing sebesar 100% dan Rp626.790.000,00. Sedangkan realisasi capaian Renstra tahun 2019 untuk kinerja dan anggaran masing-masing mencapai 100% dan Rp2.105.756.496,00. Dengan demikian diperoleh rasio capaian Renstra tahun 2019 terhadap target dan realisasi sebesar 100% kinerja dan 335.96% anggaran (Tabel 2.1).

Tabel 2. 5 Dinamika Perencanaan Program/Kegiatan Pada Indikator Kinerja Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK

No.	Renstra Tahun 2019			RKA-P SKPD Tahun 2019		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Target Anggaran
1.	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82.67%	693.840.000	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	82.67 %	2.393.369.680,00
	a. Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		346.920.000	a. Pengembangan Sistem Informasi DIY Kependudukan		1.165.597.680,00
	b. Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		346.920.000	b. Dukungan Pelayanan Administrasi DIY Kependudukan (DAK)		1.227.772.000,00
	JUMLAH		693.840.000	JUMLAH		2.393.369.680,00

Indikator kinerja Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK mencapai angka 100%. Capaian jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK tidak terlepas dari terjalinnya kerjasama dengan baik antara Instansi terkait Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder. Angka capaian ini merupakan akumulasi dari jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK yaitu mencapai 100%. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 telah terjalin kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan 7 (tujuh) organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Sosial DIY, Dinas Kesehatan DIY, Kantor Perizinan

Terpadu Satu Pintu DIY, dan Biro Kesra Setda DIY, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Rumah Sakit Panti Rapih, dan RSIA Sadewa.. Capaian pelaksanaan program/kegiatan pada indikator kinerja ini sangat dipengaruhi oleh dinamika penduduk (pindah datang) dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memiliki KTP-el (tertib administrasi kependudukan). Berikut faktor penghambat dan pendukung pencapaian indikator Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK).

Faktor Penghambat:

- Kepemilikan KTP-el bagi penduduk berstatus wajib KTP terkendala oleh distribusi blangko dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang masih kurang mencukupi. Akibatnya penduduk yang berhak untuk mendapatkan KTP-el sering harus menunggu beberapa hari, bahkan beberapa minggu, sebelum KTP-el mereka dicetak Dinas Dukcapil kabupaten/kota.
- Antusiasme orang tua untuk menguruskan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak mereka menyebabkan lonjakan permohonan di Dinas Dukcapil kabupaten/kota, terutama di daerah yang padat penduduk seperti Sleman dan Kota Yogyakarta. Tingginya antusiasme tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan sarana prasarana seperti ketersediaan blangko dan ribbon film, alat cetak, serta personel. Akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk pencetakan sampai penyerahan kepada pemohon KIA menjadi lebih lama.
- Adanya perbedaan persepsi dalam memahami beberapa kebijakan baru yang tertuang dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terutama menyangkut perlu tidaknya surat pengantar RT/RW atau desa/kelurahan. Padahal dalam Perpres tersebut tidak lagi mengatur adanya surat pengantar untuk pengurusan dokumen kependudukan. Akibatnya, penyikapan atas regulasi dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 berbeda di setiap kabupaten/kota.
- Instansi penyelenggara bidang kependudukan di tingkat provinsi maupun instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota sering kali mendapatkan permohonan akses data penduduk dari instansi vertikal. Padahal dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el, menyatakan bahwa instansi vertikal hanya dapat mengajukan permohonan akses data ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Namun bila instansi di daerah tidak memberikan akses data akan menghambat pelayanan publik di daerah.

Faktor Pendukung:

- Pengajuan permohonan dan pengambilan blangko KTP-el oleh kabupaten/kota difasilitasi melalui provinsi untuk menghemat anggaran di daerah. Hampir setiap 2 kali dalam satu bulan, provinsi mengambilkan blangko ke Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk mengatasi kekosongan stok di daerah.
- Untuk mengatasi lonjakan permohonan KIA, Dinas Dukcapil kabupaten/kota memberlakukan sistem kuota permohonan per hari. Selain untuk mengurangi antrean, sistem kuota bertujuan agar waktu tunggu permohonan sampai proses cetak KIA tidak terlalu lama.
- Secara bertahap Pemda DIY melalui Biro Tata Pemerintahan Setda DIY melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk membahas beberapa regulasi baru yang masih multitafsir. Hal ini penting dilakukan supaya tidak ada perbedaan prosedur, persyaratan, dan tata cara penerbitan dokumen kependudukan antarkabupaten/kota. Fungsi monitoring dan evaluasi provinsi atas kinerja pelayanan di kabupaten/kota juga ditingkatkan untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
- Pemda DIY telah mengusulkan kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri agar dilakukan revisi atas Permendagri Nomor 61 Tahun 2015. Hal-hal yang perlu direvisi antara lain ruang lingkup instansi pengguna, skala data yang digunakan agar dimungkinkan menggunakan skala nasional, serta penyederhanaan prosedur dan tata cara perizinan. Selain dalam bentuk pemberian rekomendasi, Pemda DIY telah memberikan akses bagi instansi pengguna di tingkat kabupaten/kota untuk memanfaatkan data skala provinsi dalam rangka efektivitas dan kemudahan pelayanan publik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Perdas No. 1 Tahun 2018, Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kependudukan. Dengan demikian Biro Tata Pemerintahan mengampu 2 urusan yakni urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dan Urusan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.

2.2.1 Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 terbagi dalam tiga bagian penting.

- a) Penguatan fungsi pelayanan di instansi pelaksana Adminduk yang berdampak langsung terhadap kemudahan penduduk dalam mengurus dokumen kependudukan.

Strategi penguatan fungsi pelayanan dilakukan dengan mengoptimalkan kualitas dan kecepatan pelayanan di instansi pelaksana Adminduk. Pemerintah Kabupaten/Kota sudah memberikan pelayanan terbaik kepada warganya dengan secara aktif mendatangi warga untuk melakukan perekaman biometrik di tempat tinggalnya terutama bagi penduduk yang berada di pelosok, penduduk lanjut usia, penduduk yang sedang sakit, dan penduduk rentan lainnya. Selain memberikan pelayanan kepemilikan KTP-el, pemerintah juga memberikan fasilitasi kepemilikan dokumen penting kependudukan bagi penduduk miskin/marginal yaitu berupa akta kelahiran dan akta perkawinan.

Pada tahun 2019 Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan tiga kali pelayanan terpadu dalam rangka percepatan kepemilikan KTP-el yang bertempat di Bangsal Wiyoto Projo Kantor Gubernur DIY. Pelayanan terpadu ini merupakan wujud dari Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (#GISA), yang pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran utama dari #GISA adalah kepemilikan KTP-el pertama kali dan pemegang Surat Keterangan (surat pengganti KTP sementara).

Selain itu, berkat suksesnya pelaksanaan pelayanan perekaman KTP-el yang menunjukkan tingginya angka perekaman KTP-el di DIY maka Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY pada tahun 2019 diminta peran sertanya oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Tim Gotong Royong

Percepatan Perekaman KTP-el di Indonesia Timur di Kabupaten Pulo Taliabu, Provinsi Maluku Utara.

- b) Pendayagunaan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan KTP-el untuk mendukung kebutuhan data bagi instansi lintas sektor.

Pada tahun 2019 Pemerintah Daerah DIY telah memberikan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY dalam hal pemutakhiran data pemilih di DIY pada Pemilu 2019. Kemudian juga telah membantu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka melakukan verifikasi dokumen kependudukan bagi Calon Aparatur Sipil Negara dan pemeriksaan identitas pemilik kendaraan bermotor. Terakhir adalah menyediakan sistem informasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi penerimaan siswa baru pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga DIY.

- c) Pencapaian target daerah terkait kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP-el, akta kelahiran, dan akta kematian)

Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah DIY menargetkan 82.67% penduduk di DIY telah memiliki dokumen penting administrasi kependudukan. Dari target tersebut sampai dengan akhir Desember 2019 telah terealisasi kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan sebesar 97.87% (118.39% terhadap target). Dengan kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan, maka masyarakat akan lebih mudah dan terjamin dalam mengakses fasilitas publik.

Tabel 2. 6 Target dan Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2018	2019		Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2019 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)	
				Target	Realisasi % Realisasi			
1	Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	92.23	82.67	97.87	118.39	92	106.38

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2019; sungguh.jogjapro.go.id/e-sakip

Sampai dengan Desember 2019, jumlah total penduduk DIY berdasarkan *database* Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di kabupaten/kota sebanyak 3.645.487 orang. Sedangkan jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 2.790.485 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.363.432 orang dan perempuan sebanyak 1.427.053 orang. Dari jumlah penduduk wajib KTP tersebut, sebanyak 2.781.908 atau 99.69%-nya telah melakukan perekaman biometrik dan tercatat di *database* KTP-el. Apabila dipilah tiap kabupaten/ kota, maka Kabupaten Kulon Progo menempati posisi tertinggi dalam angka perekaman biometrik dan kepemilikan KTP-el sebesar 99.98%, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 99.96%, Kabupaten Bantul sebesar 99.83%, Kabupaten Sleman sebesar 99.68%, dan terendah Kota Yogyakarta sebesar 99.66%.

Walaupun angka perekaman dan kepemilikan KTP-el di DIY telah melampaui target RPJMD, namun masih ada penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman biometrik sebanyak 8.577 orang atau 0.31% dari total wajib KTP. Beberapa penyebab sebagian penduduk wajib KTP belum melakukan perekaman yaitu karena tinggal sementara di luar DIY, bekerja di luar negeri, dan/atau telah pindah domisili tetapi belum melapor.

Adapun capaian DIY atas kepemilikan akta kelahiran anak sampai akhir 2019 tercatat 95.46%. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran antara lain melalui konversi *database* kelahiran non-SIAK ke *database* SIAK; kerja sama dengan puskesmas, bidan, dan rumah sakit dalam rangka percepatan penerbitan akta kelahiran; mewajibkan penduduk datang untuk melampirkan akta kelahiran; membebaskan sanksi denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran bagi penduduk dari keluarga miskin; dan pendataan penduduk secara berkala.

Kemudian capaian atas kepemilikan akta kematian tahun 2019 adalah 99.16%. Dari jumlah peristiwa kematian sebanyak 175.939, yang sudah melaporkan dan mencatatkan kematiannya adalah 174.466.

**Tabel 2. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Tahun 2019
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK)	n/a	n/a	97%	n/a	n/a	n/a	97,87%	n/a	n/a	n/a	-
	Persentase kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	n/a		80%	82,67%	86,10%	87,17%	93,23%	97,87%	97,00%	97,00%	
2.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan	n/a	n/a	100%	100%	100%	100%	109%	120,68%	100%	100%	-

2.2.2 Urusan Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di DIY didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah di DIY, pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan dilaksanakan melalui fasilitasi penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu Bidang Tenaga Kerja, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pangan, Bidang Pertanahan, Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan maksud agar terjadi harmonisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan percepatan pembentukan produk hukum daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM Pemda DIY juga telah melaksanakan sosialisasi, pendampingan, ekspose, dan pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial.

Koordinasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka tindak lanjut penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah khususnya terkait dengan pengalihan Pendanaan, Personil, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D). Permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang telah difasilitasi penyelesaiannya yaitu :

1. Pengalihan Aset Terminal A Giwangan Kota Yogyakarta
2. Pengalihan Aset Penyuluhan Perikanan
3. Pengalihan Aset Jalan Yang Mengalami Perubahan Status
4. Pengalihan Aset Hasil Proyek SCBD

Berkaitan dengan hal tersebut Pemda DIY telah menerbitkan 2 Berita Acara Serah Terima (BAST) dan 7 (tujuh) rekomendasi penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Pusat.

Sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, Gubernur DIY pada tahun 2019 melaksanakan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). Adapun bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah penerbitan Keputusan Gubernur DIY Nomor 130/KEP/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul atas nama Drs. Marsiono, M.M., Keputusan Gubernur Nomor 186/KEP/2019 tanggal 8 Agustus tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Gunungkidul, dan Keputusan Gubernur Nomor 187/KEP/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Selain itu juga telah dilaksanakan pengesahan pengangkatan anggota DPRD DIY dan DPRD Kabupaten/Kota masa jabatan 2019-2024 hasil Pemilu 2019 dengan cara penyampaian berkas kelengkapan peresmian keanggotaan DPRD DIY kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat Gubernur DIY Nomor 270/10371 tanggal 15 Agustus 2019 hal Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD DIY dan penerbitan 5 (lima) Keputusan Gubernur tentang Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota se-DIY Masa Jabatan 2019-2024 hasil Pemilu 2019.

Kemudian dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019, Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilu 2019 di DIY berjalan dengan aman dan damai. Namun ada tiga catatan utama yang harus diperhatikan, pertama, dari sisi sistem perlu adanya evaluasi

pemilu 5 surat suara yang terbukti sangat rumit dan melelahkan baik bagi penyelenggara maupun peserta pemilu dan menimbulkan korban jiwa (korban meninggal dunia di DIY sebanyak 12 orang). Kedua, dari sisi teknis perlu evaluasi terkait ketersediaan dan distribusi logistik, data pemilih, dan dukungan tenaga medis untuk petugas penyelenggara pemilu di lapangan. Ketiga, dari sisi sumber daya manusia perlu evaluasi kesiapan fisik petugas penyelenggara pemilu yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan.

Dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan Pendampingan penyusunan dokumen APBDes (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes) *Pro Poor* bagi desa-desa tertinggal. Kemudian dilakukan pula penguatan peran BPD dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan musyawarah desa, penguatan Peran Kecamatan sebagai Pembina Teknis Pemerintahan Desa PTPD, dan Pemantauan pengelolaan dana desa 5 desa tertinggal dan 387 desa di DIY

Pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan kerjasama antar daerah dalam bentuk 3 (tiga) Kesepakatan Bersama (Kerja Sama Pembangunan Daerah, Kerja Sama Pembangunan Daerah Perbatasan, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah) dan 11 (sebelas) Perjanjian Kerja Sama (Adendum Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, Pengelolaan Batas Daerah Antara Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah, Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Melalui Simpul Jaringan Informasi Geospasial, Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Aceh dan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, Pengembangan Smart City/Smart Regency untuk mewujudkan Jogja Smart Province; Perubahan/Addendum atas Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Nomor 8/PERJ/GUB/V/2015 dan 523/9330/116.01/2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Kerja Sama Bidang Perikanan dan Kelautan; Pengelolaan Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa; Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional di Wilayah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta, Pengelolaan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Pembangunan Daerah.

Berikutnya pembinaan perbatasan antar-daerah dilaksanakan melalui koordinasi rutin dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah kabupaten yang berbatasan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, serta koordinasi internal antara Pemda Daerah Istimewa

Yogyakarta dengan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan hasil berupa:

1. Dokumen pengukuran titik koordinat pilar batas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta - Jawa Tengah secara geodetik (30 titik)
2. Dokumen database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah
3. Penyelesaian permasalahan perbatasan kabupaten/kota dan/atau antar provinsi
4. Tersusunnya draf Rapergub Pengelolaan Wilayah Perbatasan.

Tabel 2. 8 Target dan Realisasi Kinerja Sub Urusan Otonomi Daerah Tahun 2019

Indikator	Satuan	Capaian 2018	2019			Target Akhir RPJMD 2022	Capaian 2018 terhadap target akhir RPJMD 2022 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %		
Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan	%	109	100	120.68	120.68	100	100

Sumber: e-sakip <http://monevapbd.jogjaprov.go.id>, 2019

Pada Sub Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Kerjasama memiliki indikator kinerja persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan. Dengan formulasi perhitungan jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan (Perda, Pergub, SE) tahun berjalan dibagi jumlah dinamika penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, dan kerjasama yang sudah teridentifikasi (29 rumusan bahan kebijakan) dikali 100%. Melalui formulasi tersebut, capaian kinerja sebesar 120.68%, dimana terdapat 35 bahan rumusan kebijakan untuk merespon dinamika penyelenggaraan otonomi daerah dan kejelasan urusan pemerintahan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pemerintah kabupaten/kota. Indikator kinerja Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan bersifat kumulatif, artinya ketercapaian indikator ini berdasarkan jumlah kumulatif kebijakan yang dihasilkan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi

Tugas

Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Fungsi

Biro Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. menyiapkan bahan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, kependudukan, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah;
- f. fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD;
- g. fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Daerah;
- h. perumusan kebijakan strategis urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. fasilitasi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. fasilitasi penyelenggaraan dan pembinaan Pemerintah Daerah, Desa dan Kelurahan;

- k. penyiapan bahan koordinasi instansi vertikal;
- l. fasilitasi dan pengoordinasian hubungan antar Pemerintah Daerah;
- m. penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- n. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan evaluasi otonomi Daerah;
- o. pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan;

Berikut adalah beberapa isu strategis yang dilakukan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY:

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efektif dan efisien.
 - a. Harmonisasi hubungan antar pemerintah daerah sangat berkaitan erat dengan pengelolaan dan penyelesaian permasalahan di wilayah perbatasan antar pemerintah daerah. Disamping itu peningkatan kerjasama antar daerah juga dapat seiring sejalan dengan terselesaikannya permasalahan di wilayah perbatasan tersebut.
 - b. Upaya-upaya penegasan batas wilayah diantaranya melalui pemeliharaan pilar dan papan batas serta pemahaman/sosialisasi tentang Permendagri yang mengatur tentang batas wilayah sehingga aparat maupun masyarakat paham mengenai batas wilayah perbatasan secara administratif, bukan yang ditandai dengan kenampakan alam saja.
2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat maupun pemerintah-pemerintah kabupaten/kota.
 - a. Koordinasi, konsultasi mengenai ruang lingkup penyelenggaraan urusan (melalui NSPK) dengan pemerintah pusat untuk disosialisasikan ke pemerintah daerah agar adanya kejelasan mengenai batasan ruang lingkup rincian urusan pemerintahan. Namun untuk urusan sub bidang urusan yang belum ada NSPKnya, pelaksanaan menjadi urusan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.
 - b. Tidak diaturnya ketentuan yang mengatur anggota DPRD kab/kota maupun provinsi yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum maupun khusus dalam hal keuangan, dalam masa tenggang menunggu keluarnya keputusan pemberhentian sementara baik dari Gubernur maupun Menteri Dalam Negeri. Sehingga perlu penyamaan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundangan yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD yang menjadi terdakwa dalam pidana khusus dan yang mengundurkan diri termasuk hak keuangannya.

- c. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota belum dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Dalam kegiatan pengalihan P3D terutama bidang PU, kewenangan pengalihan aset bersumber dari APBN merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Pengembangan sistem informasi dan database pemerintahan berbasis IT. Tuntutan pembangunan database pemerintahan berbasis teknologi informasi menjadi hal yang harus segera kita jawab dalam era global ini. Dengan demikian maka adopsi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan harus semakin ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan tepat.
- a. Peningkatan pelayanan bidang kependudukan
Kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin masih rendah. Berdasarkan data SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) masih terdapat instansi atau lembaga swasta layanan publik belum melaksanakan tertib administrasi kependudukan, misal: masih dapat berlakunya surat keterangan kelahiran atau kematian dari desa/ kelurahan padahal semestinya menggunakan akta kelahiran atau akta kematian. Sementara itu, masih terdapat pemberlakuan surat keterangan domisili padahal semestinya sudah menggunakan KTP.
 - b. Melakukan sosialisasi dengan berbagai macam media untuk meningkatkan jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el untuk melakukan perekaman.
 - c. Aksesibilitas masyarakat tentang data di bidang kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
 - d. Kesadaran penduduk untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil masih kurang. Padahal hal ini berpengaruh pada akurasi dan kemitakhiran data kependudukan.
4. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah:
- a. Berkaitan dengan pengalihan urusan kewenangan masih terdapat permasalahan belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat terkait pengalihan aset Terminal A Kota Yogyakarta dan aset penyuluhan perikanan.
 - b. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang baru ditetapkan

pada bulan April 2018 berdampak pada teknis kegiatan pendampingan APBDes Pro Poor, dari segi pedoman untuk melakukan entri pada program kegiatan berbasis pro kemiskinan (*pro poor*).

- c. Terkait dengan segmen batas daerah antar kabupaten/kota lingkup DIY, untuk penggambaran peta batas daerah skala besar (1 : 5.000) saat ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena belum ada kesepakatan dengan wilayah yang berbatasan di Provinsi Jawa Tengah (desa dan kabupaten). Dengan demikian peta database tersebut (tahun 2014-2018) belum dapat digunakan untuk mendorong percepatan pelaksanaan KSP.
- d. Kurangnya pemahaman pemerintah Kabupaten / Kota tentang Pergub Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pergantian Antar Waktu (PAW) Persetujuan Pemanggilan Untuk Penyidikan dan Pemberhentian Sementara Anggota DPRD.
- e. Kepemilikan KTP-el bagi penduduk berstatus wajib KTP terkendala oleh distribusi blangko dari Ditjen Dukcapil Kemendagri yang masih kurang mencukupi. Pada tahun 2018, total blangko yang diperoleh dari Kemendagri sebanyak 205.000 keping yang diterima oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota. Namun kebutuhan blangko untuk pelayanan kepada penduduk masih jauh dari cukup. Hal ini menyebabkan sebagian penduduk belum dapat menerima fisik KTP-el.
- f. Antusiasme orang tua untuk menguruskan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak mereka menyebabkan lonjakan permohonan di Dinas Dukcapil kabupaten/kota, terutama di daerah yang padat penduduk seperti Sleman dan Kota Yogyakarta. Tingginya antusiasme tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan sarana prasarana seperti ketersediaan blangko dan ribbon film, alat cetak, serta personel. Akibatnya waktu yang dibutuhkan untuk pencetakan sampai penyerahan kepada pemohon KIA menjadi lebih lama.
- g. Adanya perbedaan persepsi dalam memahami beberapa kebijakan baru yang tertuang dalam Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terutama menyangkut perlu tidaknya surat pengantar RT/RW atau desa/kelurahan. Padahal dalam Perpres tersebut tidak lagi mengatur adanya surat pengantar untuk pengurusan dokumen kependudukan. Akibatnya, penyikapan atas regulasi dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2018 berbeda di setiap kabupaten/kota.
- h. Instansi penyelenggara bidang kependudukan di tingkat provinsi maupun instansi pelaksana di tingkat kabupaten/kota sering kali mendapatkan permohonan akses

data penduduk dari instansi vertikal. Padahal dalam Permendagri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el, menyatakan bahwa instansi vertikal hanya dapat mengajukan permohonan akses data ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Namun bila instansi di daerah tidak memberikan akses data akan menghambat pelayanan publik di daerah.

- i. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
- j. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Biro Tata Pemerintahan pada Ranwal RKPD 2021 merencanakan 3 program kesekretariatan; Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, dan 4 program non kesekretariatan, di antaranya; Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah, Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama, Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan dan Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tabel 2. 9 Rencana Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	10 perangkat daerah

Untuk tahun 2021 Biro Tata Pemerintahan merancang program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator rencana kinerja tahunan di atas. Berikut disampaikan secara singkat review program yang ada di dokumen Rancangan Awal RKPD 2021 dengan hasil analisis kebutuhan yang ada di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Tabel 2. 10 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan SetdaDIY

Lembar : 1

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Administrasi Perkantoran	DIY	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1.540.000.000,00	Program Administrasi Perkantoran	DIY	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1.540.000.000,00	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		1. Barang Cetakn 2. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua 3. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat 4. Jasa Surat-menyurat 5. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6. Alat Tulis Kantor 7. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 9. Penggandaan 10. Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	16 Jenis 7 Unit 5 Unit 3 Jenis 15 Jenis 37 Jenis 3 Jenis 11 Jenis 80000 11 Tabung	190.000.000	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		1. Barang Cetakn 2. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Dua 3. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat 4. Jasa Surat-menyurat 5. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6. Alat Tulis Kantor 7. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 9. Penggandaan 10. Tabung pemadam kebakaran yang terisi	16 Jenis 7 Unit 5 Unit 3 Jenis 15 Jenis 37 Jenis 3 Jenis 11 Jenis 80000 11 Tabung	190.000.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1. Kinerja 1 Orang Caraka 2. Kinerja 1 Orang Perencana Program 3. Kinerja 2 Orang Pengemudi 4. Kinerja 9 Orang Pengelola Keuangan 5. Kinerja 1 Orang Fasilitasi Kepegawaian 6. Kinerja 2 Orang Pengelola Barang	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	150.000.000	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Administrasi Perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	12 bulan	150.000.000	
	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi		1. Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah 2. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah 3. Makanan dan Minuman untuk Rapat Koordinasi	1 tahun 1 tahun 1 tahun	1.200.000.000	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi		1. Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi 2. Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi	12 bulan 12 bulan	1.200.000.000	
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	DIY	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1.025.000. 000,00	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	DIY	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1.025.000. 000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan dinas operasional roda empat sesuai RKBMD	1 unit	400.000.000	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan dinas operasional roda empat sesuai RKBMD	1 unit	400.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai RKBMD 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor sesuai RKBMD	6 Jenis 2 jenis	400.000.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		1. Perlengkapan kantor sesuai RKBMD 2. Peralatan kantor sesuai RKBMD	6 Jenis 2 jenis	400.000.000	
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		1. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua 2. Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat	7 unit 5 unit	150.000.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		1. Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKBMD 2. Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKBMD	12 bulan 12 bulan	150.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan, Gedung/Kantor sesuai RKBMD	15 Jenis	75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKBMD	12 bulan	75.000.000	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	DIY	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	214.400.000,00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	DIY	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	214.400.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	nilai 70	6.700.000	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD		Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Nilai LKjIP "A"	6.700.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		<ol style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Tahunan Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ Belanja Fungsional Laporan Realisasi Semesteran dan Prognosis 	<p>1 laporan</p> <p>12 bulan</p> <p>1 laporan</p>	8.300.000	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD		Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	14 laporan	8.300.000	
	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi		<ol style="list-style-type: none"> Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pembangunan website biro Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD 	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 sistem</p>	190.000.000	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi		<ol style="list-style-type: none"> Dokumen perencanaan OPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021 Pembangunan website biro Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD 	<p>10 dokumen</p> <p>1 sistem</p> <p>1 BA</p>	190.000.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				1 BA							
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD		Realisasi penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan program dan kegiatan	95%	9.400.000			Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan sesuai Tahapan ROPK	100%	9.400.000	
4.	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	DIY	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%	2.245.000.000,00	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	DIY	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	100%	2.245.000.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan		1. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM 2. Penyusunan LPPD 3. Rekomendasi penerapan NSPK 4. Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 laporan 1 laporan 1 rekomendasi 1 rekomendasi	745.000.000	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan		1. Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 3. Rekomendasi penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 4. Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	1 laporan 1 laporan 1 rekomendasi 1 rekomendasi		
	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri		1. Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri 2. Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	5 naskah perjanjian 5 rekomendasi	1.500.000.000	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri		1. Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri 2. Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri	5 naskah perjanjian 5 rekomendasi	1.500.000.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU	2 Surat Keputusan Bersama				3. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU 4. Laporan Penyelenggaraan Forum MPU di DIY	2 Surat Keputusan Bersama 1 laporan		
5.	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	DIY	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	79,17%	728.182.500,00	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	DIY	Persentase desa tertinggal yang memiliki pengelolaan keuangan yang baik	79,17%	728.182.500,00	
	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan		1. Kesesuaian kalurahan kategori tertinggal dalam penerapan siklus tahunan desa dan ketepatan sasaran pembangunan desa 2. Terbinanya aparatur pemerintahan kalurahan kategori tertinggal dalam proses perencanaan desa 3. Terbinanya aparatur pemerintahan kalurahan kategori tertinggal dalam tata kelola keuangan desa	2 desa 5 desa 5 desa	364.182.500	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan		1. Kesesuaian kalurahan kategori tertinggal dalam penerapan siklus tahunan desa dan ketepatan sasaran pembangunan desa 2. Terbinanya aparatur pemerintahan kalurahan kategori tertinggal dalam proses perencanaan desa 3. Terbinanya aparatur pemerintahan kalurahan kategori tertinggal dalam tata kelola keuangan desa	2 desa 5 desa 5 desa	364.182.500	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan		1. Data aparatur pemerintahan kalurahan/kelurahan 2. Evaluasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan / kelurahan, kapanewon dan kemantren 3. Monitoring perkembangan pengelolaan dana desa di DIY	1 laporan 1 rekomendasi 1 laporan	364.000.000	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan		1. Data aparatur pemerintahan kalurahan/kelurahan 2. Dokumen rekomendasi pelaksanaan koordinasi 3. Laporan perkembangan pengelolaan dana desa di DIY	1 laporan 1 dokumen rekomendasi 1 laporan	364.000.000	
6.	Program Pemerintahan Umum dan Pembinaan Wilayah	DIY	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100%	695.000.000,00	Program Pemerintahan Umum dan Pembinaan Wilayah	DIY	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100%	695.000.000,00	
	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1. Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu 2. Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum 3. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Gunungkidul dan Sleman	3 usulan draft/SK 1 laporan 1 laporan	225.000.000	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1. Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu 2. Laporan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintahan umum 3. Laporan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Gunungkidul dan Sleman	3 usulan draft/SK 1 laporan 1 laporan	225.000.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi		1. Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah 2. Hasil Verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari kab/kota 3. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY 4. Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan 5. Sistem Informasi Manajemen Pilar batas Daerah 6. Terukurnya koordinat pilar batas secara geodetik 7. Toponimi unsur warisan budaya	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 sistem 30 titik 1 dokumen	470.000.000	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi		1. Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah 2. Hasil Verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari kab/kota 3. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY 4. Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan 5. Sistem Informasi Manajemen Pilar batas Daerah yang terupdate 6. Koordinat pilar batas secara geodetik 7. Toponimi unsur warisan budaya	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 sistem 30 titik 1 dokumen	470.000.000	
7	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87.17%	990.800.000,00	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DIY	Persentase Kepemilikan Dokumen Penting Administrasi Kependudukan (KTP - el, Akta kelahiran Anak, Akta Kematian)	87.17%	1.233.550.000,00	Memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD DIY untuk Sosiali

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											sasi Perda No.9 Tahun 2015 tentang Admin duk senilai Rp 242.75 0.000, 00
	Peningkatan Penyelenggara n Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		<ol style="list-style-type: none"> 1. Blanko KIA 2. Dokumen akta kelahiran bagi penduduk miskin/marginal 3. Dokumen akta kematian bagi penduduk miskin/marginal 4. Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan(Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar) 5. Lembaga yang dikoordinasi dan 	50.000 keping 400 akta 200 akta 80 dokume n 6 lembaga	690.800.000	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		<ol style="list-style-type: none"> 1. Blanko KIA 2. Dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan(Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Orang Terlantar) 3. Lembaga yang dikoordinasi dan bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY 4. Penduduk yang terlayani dalam pelayanan terpadu 	50.000 keping 80 dokume n 6 lembaga 7500 orang untuk KTP-el , 1500 orang	933.550.000	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			6. bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY Pelayanan terpadu penerbitan KTP-el dan KIA di 5 kab/kota se-DIY	5 kali (7.500 keping blangko KTP-el dan 1.000 keping KIA)				5. Masyarakat yang sadar adminduk	untuk KIA 1.000 orang		
	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di kabupaten/kota 2. Pemanfaatan data kependudukan oleh instansi pengguna dalam rangka percepatan pelayanan publik 3. Profil perkembangan kependudukan 4. Sistem informasi dalam rangka pemanfaatan data kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 dokumen 3 instansi 1 dokumen 3 sistem 	300.000.000	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data		<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di kabupaten/kota 2. Instansi yang memanfaatkan data kependudukan 3. Profil perkembangan kependudukan 4. Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 dokumen 3 instansi 1 dokumen 3 konten 	300.000.000	
8						Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Keistimewaan)	DIY	Termonitornya penerapan keistimewaan di Kalurahan, Kapanewon dan Kemantren di DIY		535.900.000,00	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Kegiatan Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pemantauan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon, Kemantren dan Kalurahan		1. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren 2. Sistem aplikasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	5 lporan 1 sistem	535.900.000	
	Jumlah				7.438.382.500,00					8.217.032.500	

Dari rancangan awal program Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yang ada di Rancangan Awal RKPD DIY Tahun 2021 sebesar Rp7.438.382.500,00 Sedangkan setelah dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi (*existing*) saat ini, anggaran Biro Tata Pemerintahan bertambah menjadi Rp8.217.032.500,00 atau ada penambahan sekitar Rp. 778.650.000,00. Penambahan tersebut disebabkan adanya penambahan dan/atau perubahan keluaran/ouput kegiatan. Hal tersebut terjadi karena seiring berjalannya waktu, terjadi dinamika dalam pemerintahan dan kelembagaan yang harus segera disikapi dan direspon dalam proses perencanaan dan penganggaran demi penyelenggaraan tata pemerintahan yang optimal responsivitasnya.

Tabel 2. 11 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2021 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	DIY	Masyarakat yang sadar adminduk	1.000 orang	2 x 5 kab/kota @100 orang = 1.000 orang

Sedangkan mengenai usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2021 mendapatkan usulan dari pokok-pokok pikiran DPRD DIY untuk mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak. Sosialisasi ini sudah termasuk di dalam Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga cukup dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp242.750.000,00 dari pagu awal yang hanya Rp690.800.000,00 menjadi Rp933.550.000,00.

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan peralihan antara periode RPJMD 2012 - 2017 dan RPJMD 2017 - 2022. Sebagai tahapan tahun kedua RPJMD 2017 - 2022, penyusunan RKPD tahun 2021 dilaksanakan dengan mengakomodir upaya penyelarasan materi awal RPJMD 2017 - 2022 dengan menyesuaikan konten RKPD tahun 2021 dengan dokumen *background study* RPJMD terkait. Penyelarasan ini dilakukan dengan maksud untuk menjaga keselarasan RKPD tahun 2021 dengan calon dokumen perencanaan jangka menengah yang akan dijabarkan.

RPJMD DIY 2017-2022 berpedoman pada RPJMN 2015-2019 dimana penekanan pada RPJMD DIY 2017-2022 adalah pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas hidup dan kehidupan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta serta penguatan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbasis pada sumber daya lokal dan didukung oleh harmonisasi bermasyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penekanan pada RPJMD DIY 2017-2022 ini telah selaras dengan visi RPJMN untuk memberdayakan sumber daya manusia yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan dalam hal menciptakan pembangunan ekonomi yang berlandaskan pemberdayaan sumber daya manusia ke arah Kesejahteraan Rakyat.

Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dan nasional dilaksanakan dengan menggunakan prinsip *money follows program*. Pendekatan tersebut mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN dilaksanakan dengan:

- 1) Penyelarasan isu strategis pembangunan daerah
- 2) Penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah
- 3) Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

- 4) Penyeragaman Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 5) Penyeragaman Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah dan
- 6) Penyeragaman Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah

Selain pada RPJMN 2015-2019, RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 juga berpedoman pada RPJP Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025. RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta menjabarkan kehendak masyarakat DIY yang dijadikan pedoman dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selama 20 tahun. RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Visi RPJMD DIY pada periode 2017-2022 mengambil Tema:

“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022. Kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam **“Lima Kemuliaan”** atau **“Panca Mulia”** yakni:

- 1) terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
- 2) terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
- 3) terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
- 4) terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
- 5) terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sedangkan untuk Misi RPJMD DIY 2017-2022 yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mendukung tercapainya misi kedua dari RPJMD DIY 2018-2022 yaitu; ***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis***; dimana rumusan misi ini meringkas Panca Mulia (lima kemuliaan) 4, dan 5. Dari Misi tersebut, ditetapkanlah tujuan Biro Tata Pemerintahan, yang diharapkan akan tercapai di 2020 nanti yaitu; ***Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah***.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Mengacu pada visi dan misi DIY 2017-2022, maka selanjutnya Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Rumusan tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 2017-2022 dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan DIY, yaitu optimalnya responsivitas dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Terdapat dua sasaran pada Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam perencanaan strategis tahun 2017-2022, yaitu:

1. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan.

Maka berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah DIY yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, berikut disajikan table tujuan dan sasaran pembangunan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tahun 2017-2022

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	a. Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	4	7	10	13	15

Tujuan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY yaitu *Optimalnya Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Sedangkan untuk sasaran strategisnya ada 2 (dua) diantaranya;1). Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama, dengan indikator: Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama yang direspon dengan kebijakan (target 100%),
2). Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, dengan indikator: Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK (target 13 instansi).

3.3 Program dan Kegiatan

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	100%	Rp 685.628.000,00	APBD		100%	Rp 1.290.000.000,00
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Alat Tulis Kantor	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	34 Jenis	Rp 110.918.000,00	APBD		34 Jenis	Rp 190.000.000,00
		Barang Cetak	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	13 Jenis				13 Jenis	
		Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda Empat	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	5 Unit				5 Unit	
		Bukti Pembayaran Pajak/ STNK	Biro Tata Pemerintahan	7 Unit				7 Unit	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	Setda DIY						
		Jasa Surat-Menyurat	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	3 Jenis			3 Jenis		
		Komponen Intalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	8 Jenis			8 Jenis		
		Dokumen Hasil Penggandaan	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	50.000 Lembar			50.000 Lembar		
		Tabung Pemadam Kebakaran Yang Terisi	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	11 Tabung			11 Tabung		
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	15 Jenis			15 Jenis		
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Administrasi Perkantoran yang terselesaikan dengan Baik dan Tepat Waktu	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	12 Bulan	Rp 132.960.000,00	APBD	12 Bulan	Rp 150.000.000,00	
	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Konsultasi dan Koordinasi	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	12 Bulan	Rp 441.750.000,00	APBD	12 Bulan	Rp 950.000.000,00	
		Laporan dan Rencana Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	12 Bulan			12 Bulan		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	100%	Rp 249.495.000,00	APBD		100%	Rp425.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan kantor sesuai RKBMD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	3 Jenis	Rp 55.275.000,00	APBD		3 Jenis	Rp 200.000.000,00
		Perlengkapan kantor sesuai RKBMD	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1 Jenis			1 Jenis		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Peralatan kantor yang terpelihara sesuai RKPBMMD	DIY	12 Bulan	Rp 52.720.000,00	APBD		12 Bulan	Rp 75.000.000,00
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara sesuai RKPBMMD	DIY	7 Unit	Rp 141.500.000,00	APBD		7 Unit	Rp 150.000.000,00
		Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara sesuai RKPBMMD			5 Unit			5 unit	
	Program Peningkatan	Terwujudnya penata	Biro Tata	100%	Rp 94.122.000,00	APBD		100%	Rp100.223.574,00

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	Pemerintahan Setda DIY						
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) yang capaian kerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra dan IKU)	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	Nilai LKjIP "A"	Rp 6.200.000,00	APBD		Nilai LKjIP "A"	Rp 6.900.000,00
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan keuangan sesuai dengan realisasi penggunaan anggaran, dokumen perencanaan anggaran dan dapat memberikan informasi keuangan bagi pengguna informasi	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	14 Laporan	Rp 4.380.000,00	APBD		14 Laporan	Rp 8.400.000,00
	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen perencanaan OPD TA. 2022 dan Perubahan TA. 2021	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	10 Dokumen	Rp 76.980.000,00	APBD		10 Dokumen	Rp 75.423.574,00

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Kesepakatan Hasil Forum Perencanaan OPD		1 BA				1 BA	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan sesuai Tahapan ROPK	Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	100%	Rp 6.562.000,00	APBD		100%	Rp 9.500.000,00
	Program Pembinaan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP-el, akta kelahiran anak, akta kematian)	DIY		Rp481.110.000,00	APBD			Rp985.380.000,00
	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Blanko KIA	DIY	10.000 Keping	Rp 263.610.000,00	APBD		10.000 Keping	Rp 656.920.000,00
		Dukungan penerbitan dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat KeteranganOrang Terlantar)	DIY	50 Dokumen				50 Dokumen	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Masyarakat yang sadar adminduk	DIY	600 Orang				600 Orang	
		KTP-el dan KIA yang diterbitkan dalam pelayanan terpadu	DIY	200 KTP, 100 KIA				200 KTP, 100 KIA	
		Lembaga yang Dikoordinasi dan Bekerjasama dalam Insentif Anak di DIY	DIY	5 Lembaga				5 Lembaga	
		Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Penerbitan Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Lintas Kab/ Kota se-DIY	DIY	2 Kali				2 Kali	
		Masyarakat yang memahami Perda No.9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	DIY	600 Orang				600 Orang	
	Pengelolaan Sistem Administrasi	Instansi yang memanfaatkan data	DIY	3 Instansi	Rp 217.500.000,00	APBD		3 Instansi	Rp 328.460.000,00

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kependudukan dan Pemanfaatan Data	kependudukan							
		Konten yang dikembangkan dari sistem informasi kependudukan	DIY	2 Konten		APBD		2 Konten	
		Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk di kabupaten/kota	DIY	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
		Profil perkembangan kependudukan	DIY	1 Dokumen				1 Dokumen	
	Program Pembinaan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah dan kerjasama	DIY	100%	Rp1.428.582.000,00	APBD		100%	Rp1.305.000.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	DIY	1 Laporan	Rp 320.217.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 745.000.000,00

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Rekomendasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	DIY	1 Rekomendasi		APBD		1 Rekomendasi	
		Laporan Standar Pelayanan Minimal 6 bidang SPM	DIY	1 Laporan		APBD		1 Laporan	
	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri	Seluruh Indonesia	5 Naskah Perjanjian	Rp 1.108.365.000,00	APBD		5 Naskah Perjanjian	Rp 560.000.000,00
		Rekomendasi Hasil Monev Kerjasama Dalam Negeri		5 Rekomendasi				5 Rekomendasi	
		Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota FKD-MPU		2 Surat Keputusan Bersama				2 Surat Keputusan Bersama	
		Laporan Penyelenggaraan Forum MPU di DIY		1 Laporan				n/a	
	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan dan				Rp273.000.000,00	APBD			Rp782.332.000,00

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Kecamatan								
	Pembinaan Aparatur Desa/ Kelurahan, dan Kecamatan	Laporan Desa yang terdampingi dalam penyusunan dokumen administrasi perencanaan responsif	DIY	1 Laporan	Rp 136.500.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 586.749.000,00
		Laporan Kecamatan dengan aparatur yang terbina sebagai pembina teknis pemerintah desa (PTPD)	DIY	1 Laporan		APBD		1 Laporan	
	Koordinasi, Monitoring, dan, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	Laporan Hasil Pemantauan Pengelolaan Dana Desa di DIY	DIY	1 Laporan	Rp 136.500.000,00	APBD		1 Laporan	Rp 195.583.000,00
		Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di DIY	DIY	1 Laporan				1 Laporan	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Program Pembinaan Pemerintahan Umum dan Penataan Wilayah	Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	DIY	100%	Rp 256.575.000,00	APBD		100%	Rp. 582.270.000,00
	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD pergantian antar waktu	DIY	3 Usulan Draf/SK	Rp 80.325.000,00	APBD		3 Usulan Draf/SK	Rp 200.000.000,00
		Laporan pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Bupati-Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020	DIY	1 Laporan				1 Laporan	
	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	Database pilar batas untuk pengelolaan tanda batas wilayah	Perbatasan DIY-Jateng	1 Dokumen	Rp. 176.250.000.00			1 Dokumen	Rp382.270.000,00
		Hasil Verifikasi usulan pembakuan nama rupabumi dari kab/kota	DIY dan Kab/Kota	1 Dokumen				1 Dokumen	
		Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	DIY	1 Dokumen				1 Dokumen	

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		kabupaten/ kota di DIY							
		Laporan penyelarasan pembangunan di wilayah perbatasan	DIY	1 Laporan				1 Laporan	
		Toponimi unsur warisan budaya	DIY	1 Dokumen			-	n/a	
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proposional	DIY	87.5 %			-		
	Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon/Kemantren	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penerapan Kelembagaan Kalurahan dan Kapanewon / Kemantren	DIY	5 laporan	Rp2.341.447.000,00		n/a		

Sumber : jogjaplan.com; RKPD DIY 2021, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY

Biro Tata Pemerintahan Tahun 2021 merencanakan anggaran sebesar Rp 5.833.209.000,00 untuk melaksanakan sebanyak 8 program dan 19 kegiatan.

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan dokumen tahunan yang berpedoman pada dokumen renstra perangkat daerah, dan mengacu pada RKPD daerah. Pada Tahun Anggaran 2021 nanti, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY akan melaksanakan 8 program dan 18 kegiatan. Keseluruhan rencananya akan dibiayai dengan skema anggaran APBD. Lebih jelasnya berikut Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 yang akan dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Biro Tata Pemerintahan pada khususnya dan Pemerintah Daerah DIY pada umumnya.

Tabel 4. 1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama.	Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah, dan kerja sama yang direspon dengan kebijakan	100%
Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Jumlah instansi lembaga yang memanfaatkan data kependudukan dan NIK	13 perangkat daerah

Disamping skema penganggaran APBD, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY semenjak 2 Tahun 2017 menerima kegiatan dengan skema pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Secara mendetail belum bisa disampaikan, karena kegiatan beserta angka nominal anggarannya merupakan pemberian dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memiliki petunjuk teknis pelaksanaan secara tersendiri, meskipun dalam pengelolaannya nanti diperlakukan sama dengan kegiatan dengan skema APBD.

BAB 5 PENUTUP

Renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada rancangan awal RKPD. RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN yang saat ini masih dalam proses penyusunan naskah Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024. Sehingga Renja ini disusun dengan berpedoman pada RKPD 2021.

Renja Tahun 2021 ini merupakan gambaran kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam melaksanakan ketugasan dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Renja Tahun 2021 diharapkan dapat memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menyusun rencana kegiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; menyediakan acuan resmi bagi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai dari APBD; memudahkan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam memahami dan menilai prioritas, sasaran, dan program-program operasional tahunan; serta sebagai tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

Program dan kegiatan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam Renja Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018, serta sejumlah peraturan perundangan nasional, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sehubungan dengan beberapa peraturan-perundangan tersebut di atas, terdapat sejumlah momen penting yang perlu diperhatikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2020 dan 2021, yang bisa mempengaruhi langkah Biro Tata Pemerintahan kedepannya. Sejumlah momen penting dimaksud adalah :

1. Pemberlakuan Permendagri No. 90 Tahun 2020 sebagai acuan pemetaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada penganggaran tahun 2021.
2. Pelaksanaan beberapa kebijakan bidang Kependudukan, misalnya kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) dan percepatan pelayanan di bidang administrasi kependudukan.

Pada tahun anggaran 2021, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY mengusulkan 8 Program dan 20 kegiatan yang kegiatan yang dibiayai APBD dan Dana Keistimewaan dengan Penganggaran sebesar Rp 8.124.282.500,00. Di antara kedelapan program tersebut terdapat 2 (dua) program unggulan , yang satu karena menyangkut perubahan nomenklatur desa, kalurahan, kapanewon, dan kemantren; yang satunya lagi karena bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat, yakni Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dan Program Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Pada akhirnya, dalam mencapai target program dan kegiatan di Tahun 2021 nantinya, Biro Tata Pemerintahan membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di DIY.